

GRATIS
TANPA IURAN

EDISI JUMAT
16 JUNI 2023



GUBERNUR ISRAN SERAHKA PENGHARGAAN PROPER, ADIWIYATA, DAN KALPATARU



PEMERINTAH UPAYAKAN KERJA SAMA PENERBANGAN DARI SARAWAK KE IKN



AirAsia menambah rute baru penerbangan yang menghubungkan Jakarta dan Kuching, Malaysia.

PEMERINTAH UPAYAKAN KERJA SAMA PENERBANGAN DARI SARAWAK KE IKN

SARAWAK - Daya tarik Ibu Kota Nusantara (IKN) terus disebarluaskan. Di tengah menggeliatnya pembangunan, fasilitas penunjang lain seperti akses menuju IKN juga terus dikembangkan. Salah satunya, membuka jalur penerbangan langsung menuju IKN.

Pemerintah melalui Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Witjaksana mengatakan, pihaknya tengah menjajaki peluang kerja sama penerbangan dari Sarawak, Malaysia menuju ke IKN di Kalimantan Timur.

"Sarawak menantikan hubungan konektivitas dengan IKN. Kami juga terus mendorong agar semakin banyak konektivitas menuju berbagai destinasi di Indonesia," kaya Raden Sigit di Kuching, Malaysia pada Kamis, 15 Juni 2023.

Ia menyampaikan, kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terus dilakukan tidak hanya dengan maskapai penerbangan, tetapi juga bersama Ke-

menterian Transportasi Sarawak, Kementerian Pariwisata, Industri Kreatif dan Seni Pertunjukan Sarawak, Dewan Pariwisata Sarawak, dan lainnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada maskapai penerbangan AirAsia yang telah membuka rute baru penerbangan langsung dari Jakarta menuju Kuching PP. Ke depannya, Raden Sigit berharap agar maskapai tersebut juga membuka penerbangan menuju Balikpapan dan Pontianak.

Menurut dia, meningkatnya pergerakan orang dari Malaysia ke Indonesia akan berdampak pada peningkatan hubungan kedua negara dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi bisnis, perdagangan, pariwisata, hingga investasi.

"Tahun lalu wisatawan Malaysia masuk ke Indonesia sebanyak 1,7 juta orang. Kalau ada penerbangan dari Sarawak ke Balikpapan maka akan lebih mendekat ke IKN," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transportasi Sarawak YB

Dato' Sri Lee Kim Shin mengatakan bahwa konektivitas antara Indonesia dan Malaysia merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk industri.

Menurut dia, langkah awal AirAsia membuka penerbangan langsung Jakarta-Kuching akan meningkatkan jumlah pergerakan orang dan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

"Koneksi ke Jakarta adalah sebuah cara untuk konektivitas yang lebih luas dari Sarawak ke bagian lain di Indonesia, terutama dengan berdirinya ibu kota administratif baru Nusantara di Kalimantan Timur," katanya.

Sebagai informasi, Dinas Pariwisata Kaltim telah menyiapkan sejumlah destinasi wisata di Kota Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, dan lainnya untuk menyambut IKN. Sejumlah destinasi tersebut antara lain wisata bahari, wisata pantai, wisata budaya, wisata religius, wisata sungai, dan lainnya. **(kn)**



GUBERNUR ISRAN SERAHKAN PENGHARGAAN PROPER, ADIWIYATA, DAN KALPATARU

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (15/6).

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diiringi dengan penyerahan penghargaan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan Adiwiyata, dan Kalpataru tingkat Provinsi Kaltim oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Isran Noor.

Sebanyak 265 perusahaan menerima penghargaan Proper untuk pengelolaan lingkungan hidup periode penilaian 2022-2023, termasuk dari sektor industri jasa, kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan.

Dari hasil penilaian, terdapat 14 perusahaan dengan peringkat emas, 103 perusahaan dengan peringkat hijau, 127 perusahaan dengan peringkat biru, dan 21 perusahaan dengan peringkat merah.

Selain itu, terdapat penghargaan Kalpataru untuk 8 tokoh tingkat provinsi yang diakui sebagai perintis dan penyelamat lingkungan, serta penghargaan

Adiwiyata untuk 44 sekolah di Kalimantan Timur yang berhasil menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah.

Isran berharap apa yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi lingkungan, khususnya di Kaltim. "Kaltim memiliki peran yang besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tidak hanya secara nasional, tetapi juga global," katanya.

Isran mengucapkan selamat kepada penerima Proper dan menekankan pentingnya peringkat kinerja perusahaan yang menjadi acuan untuk perbaikan.

Gubernur juga mencatat peningkatan dalam peringkat kinerja perusahaan, dengan semakin banyak perusahaan yang meraih peringkat emas dan peningkatan dari peringkat merah ke biru serta dari biru ke hijau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal, dalam laporannya menyebutkan bahwa jumlah peserta Proper pada periode penilaian mencapai 265 peserta, dengan 78 peserta dari sektor industri jasa, 85 peserta

dari sektor kelapa sawit, 83 peserta dari sektor pertambangan batu bara, dan 19 peserta dari sektor kehutanan.

Penilaian dilakukan mulai dari 20 Februari hingga 17 Mei 2023, dengan mekanisme penilaian meliputi verifikasi lapangan dan penilaian dokumen mandiri, serta pemaparan kinerja unggulan pada 19-20 Mei.

Pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan di Kaltim pada khususnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi juga diperlukan dukungan kemitraan serta kolaborasi dari kalangan stakeholder dan masyarakat agar berjalan seimbang.

Karenanya, permasalahan hubungan bukanlah hanya milik satu negara akan tetapi permasalahan itu adalah milik bersama penduduk dunia.

Tampak Hadir, Sekretaris Diskominfo Kaltim Hermawanto, Perangkat Daerah Kaltim, DLH Kabupaten dan Kota, Pimpinan Perusahaan serta Pimpinan lembaga Pendidikan. **(Prb/ty/dis-kominfo Kaltim).**



Kim Woo-bin dan Suzy tengah mengerjakan proyek terbaru mereka, *All Your Wishes Will Come True*.

KIM WOO-BIN & SUZY REUNI DI DRAMA KOMEDI ROMANTIS

SEOUL – Kim Woo-bin dan Suzy segera bereuni di proyek drama terbaru mereka. Rumah produksi Hwa&Dam Pictures, Rabu, 14 Juni 2023, mengonfirmasi bahwa keduanya membintangi serial komedi romantis *All Your Wishes Will Come True*.

Drama tersebut menceritakan jin emosional dan labil yang terjebak dalam lampu ajaib serta Ga-young, seorang perempuan yang kurang perasa. Ga-young tak sengaja "memanggil" sang jin sehingga tiga keinginannya berhak dikabulkan.

All Your Wishes Will Come True ditulis oleh Kim Eun-sook, penulis naskah kenamaan Korea. Proyek itu bakal "mengembalikan" Eun-sook ke genre fantasi dan komedi romantis, setelah sebelumnya menulis *The Glory*. Sementara itu, sutradara *Extreme Job* Lee Byung-hun bakal membesut serial tersebut. Serial

sepanjang 12 episode itu dijadwalkan rilis tahun depan.

Proyek itu pun menjadi reuni Woo-bin dan Suzy setelah tujuh tahun. Kali terakhir, mereka membintangi drama *Uncontrollably Fond* pada 2016. Sayangnya, proyek tersebut gagal meraup rating tinggi meski dibintangi dua nama besar.

Dalam *Uncontrollably Fond*, Kim Woo-bin berperan sebagai Shin Joon-young sementara Suzy menjadi No Eul yang patah hati ketika masih remaja karena berpisah satu dengan yang lain.

Keduanya kemudian bertemu lagi saat dewasa. Shin Joon-young sudah menjadi aktor terkenal dan juga penyanyi. Sedangkan No Eul menjadi sutradara produksi dokumenter yang sangat menyukai uang dan kerap "menjilat" pemegang kekuasaan. **(kn)**



Kontrak Marc Marquez bersama Honda akan berakhir pada musim balapan 2024.

HONDA TIDAK TAKUT DITINGGAL MARC MARQUEZ

SACHSENRING – Kebersamaan Marc Marquez dan Honda tampaknya bakal berakhir lebih cepat. Pasalnya, kontra pembalap asal Spanyol tersebut tuntas pada akhir musim balapan 2024. Sementara Honda belum memberikan tanda-tanda bakal perpanjangan kontrak.

Penampilan Marquez memang jauh dari memuaskan. Rentetan cedera membuatnya mesti menepi dalam waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi, Marquez seperti kehabisan bensin tatkala menghadapi barisan pembalap muda yang fresh dan beryali.

Terkait masa depan Marquez, Presiden Honda Racing Corporation (HRC) Koji Watanabe membuat pernyataan yang cukup tegas. Dia menyebut Honda tidak takut ditinggal pergi pembalap yang telah memberi

mereka enam gelar juara dunia MotoGP itu.

Dalam wawancara dengan Marca, Watanabe menyebut Honda akan selalu menghormati masukan dan keputusan pembalap mereka. Watanabe juga mengakui pihaknya masih berharap Marquez mau bertahan di Honda sampai pensiun. Namun, sekali lagi dia juga menyebut sama sekali tidak ada paksaan bagi Baby Alien bertahan di Honda.

"Kami sama sekali tidak merasa ketakutan jika sampai ditinggal Marc. Kami akan menghormati setiap keputusan yang dibuatnya," ujar Watanabe dikutip Marca.

Pria yang berperan penting bagi Honda dan mengantar Red Bull juara Formula 1 dua musim terakhir itu mengatakan, sampai saat ini belum ada negosiasi perpanjangan kontrak antara Honda

dan Marquez. Dia mengatakan itu semua baru akan dimulai tahun depan. "Tapi selama ini kami masih lancar berkomunikasi satu sama lain," aku Watanabe.

Ucapan Watanabe ini secara tidak langsung menanggapi rumor Marquez yang ingin hengkang dari Honda. Pasalnya, hingga saat ini mesin motor terbaru pabrikan Jepang itu belum juga mampu menyaingi Ducati di lintasan MotoGP. Marquez juga terus mengkritik performa dari motornya sendiri.

Ducati sendiri sudah menyebut tidak tertarik membujuk Marquez bergabung dengan mereka. Usia Marquez yang kini sudah menginjak 30 tahun mereka anggap sudah terlalu tua. Di lain sisi, pabrikan KTM sudah terang-terangan siap menampung Marquez jika dia ingin pergi dari Honda. **(kn)**



Hosted by:



INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
*** Subject to confirmation*



Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum
Hakim Mahkamah Konstitusi



Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana
Senior Pastor of GBI ROCK Ministry



Mark Mudri
Church Relations SA ACT Bible Society Australia
Chair global council Advocates International



Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.
Advokat



Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb, FCI Arb.
Managing Partner Budidjaja International Lawyers,
Direktur Lawyarinindo Legal Support Center



Dr. Albert Aries, SH., MH
Pengajar FH Universitas Trisakti

OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

THEME

Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tetapi biarlah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE
- 01 JULY
2023**



**MENORAH HALL
LEMBAH PUJIAN**

JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:
<http://tiny.cc/Indojc2023>

Information:
Michelle - 082217014339
Junus BM - 0821 1021 1110



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

PUTUSKAN TETAP SISTEM PEMILU TERBUKA

MK: BUBARKAN PARPOL YANG MEMBIARKAN POLITIK UANG

BACA HALAMAN 2-8

ANWAR USMAN



TRAGIS! PRIA DITEMUKAN TEWAS TERBUJUR KAKU DI KAMAR GUEST HOUSE SAMARINDA

BACA HALAMAN 29

Putuskan Tetap Sistem Pemilu Terbuka

MK: Bubarkan Parpol yang Membiarkan Politik Uang

JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam persidangan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik.

"Dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentral-nya dalam kehidupan berdemokrasi," ujar Saldi Isra.



Menurut Mahkamah, tuturnya melanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar, dalil para Pemohon adalah sesuatu yang berlebihan.

“Karena, sampai sejauh ini, partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon,” ujar Saldi Isra.

Terkait dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang tidak sesuai dengan ideologi partai, Saldi Isra menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam memilih calon yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan.

Di sisi lain, mengenai peluang terjadinya politik uang dalam sistem proporsional terbuka, Saldi Isra mengatakan bahwa pilihan terhadap sistem pemilihan umum apa pun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang.

“Misalnya, dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai politik dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut “nomor urut calon jadi” agar peluang atas keterpilihannya semakin besar,” kata Saldi Isra.

Oleh karena itu, menurut Saldi Isra, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan sebagai efek jera.

“Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan,” tegasnya.

Saldi Isra menegaskan bahwa praktik politik uang berpotensi terjadi dalam semua sistem pemilihan umum. Langkah untuk menimbulkan efek jera merupakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadin-

ya praktik politik uang.

Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.

PARPOL TETAP KUAT

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa partai politik tidak semata-merta dilemahkan dengan penerapan sistem proporsional daftar calon terbuka, terbukti dari peran sentral partai dalam menentukan bakal calon anggota legislatif untuk pemilihan umum (pemilu).

“Partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR/DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana dan program kerja partai politik yang bersangkutan,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pernyataan ini membantah dalil para pemohon yang menilai bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan peran partai politik.

Dalam konteks Indonesia, sejarah menunjukkan nomor urut calon anggota legislatif (caleg) sangat krusial dalam menentukan kemenangan.

Saldi memaparkan bahwa apabila dibaca secara saksama, hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2019, sekali pun menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, secara empirik calon terpilih tetap merupakan calon yang berada pada nomor urut 1 dan nomor urut 2. “Yang dapat dimaknai sebagai ‘nomor urut calon jadi’ yang diajukan partai politik,” ucap Saldi.

Mahkamah mengutip hasil riset Pusat Kajian dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Pada Pemilu 2009, terdapat 79,1 anggota DPR terpilih merupakan caleg nomor urut 1 dan 2. Pada 2014, jumlahnya mencapai 84,3 persen. Pada Pemilu 2019, jumlahnya 82,44 persen.

“Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum,” ujarnya.

Mahkamah mempertimbangkan terkait dalil bahwa partai politik kehilangan peran sentralnya dalam sistem politik Indonesia, maka itu adalah tanggung jawab partai politik untuk memperkuat kelembagaannya sebagai saluran aspirasi konstituen.

BAWASLU SIAP KAWAL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan siap mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.

“Bawaslu menghargai putusan MK yang esensinya mengawal proses demokrasi dan akan mengawal putusan MK tersebut,” ujar anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Puadi, MK memiliki pertimbangan yang matang dalam menghadirkan putusan itu, dan ia juga menilai MK telah memperhatikan konteks politik, budaya, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam memutuskan tetap berlakunya sistem pemilu proporsional terbuka.

Secara pribadi, Puadi berpandangan sistem proporsional terbuka memungkinkan adanya representasi yang lebih akurat dari preferensi pemilih dalam pemilihan legislatif.

“Dalam sistem ini, partai dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kursi, sehingga berbagai kelompok politik dapat diwakili secara proporsional,” ujar dia.

Puadi pun menyampaikan Bawaslu tetap berkomitmen untuk fokus menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memastikan penyeleng-

garaan Pemilu 2024 berintegritas. JANGAN TERLALU SERING UBAH SISTEM PEMILU

Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk undang-undang (uu) untuk tidak terlalu sering mengganti sistem pemilihan umum (pemilu) yang berlaku guna memberikan kepastian kepada para pemilih dan peserta pemilu.

“Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, tidak terlalu sering melakukan perubahan,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra.

Sehingga, tutur Saldi melanjutkan, dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum.

Hal lainnya yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang jika ingin melakukan perbaikan terhadap sistem pemilu yang berlaku adalah kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku.

“Terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum,” ucapnya.

Hal ketiga adalah perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan.

Selanjutnya, kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

“Lima, apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna,” kata Saldi Isra.

KPU: DESAIN REGULASI SESUAI SISTEM TERBUKA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan merancang regulasi teknis Pemilu 2024 sesuai den-



FOTO : NICHIA / MEDIAKALTIM.COM

Ruas jalan di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat masih ditutup oleh aparat kepolisian terkait pengamanan sidang putusan gugatan Sistem Pemilu.

gan sistem pemilu proporsional terbuka, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jadi ke depan, kami akan mendesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilu yaitu sesuai dengan sistem proporsional daftar terbuka,” ujar anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Idham juga mengatakan, regulasi teknis itu mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang memang mengamankan penyelenggaraan pemilu di Tanah Air menggunakan sistem proporsional terbuka.

Lebih lanjut, regulasi teknis tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya adalah pemungutan dan penghitungan suara, metode konversi suara menjadi kursi di parlemen, serta penentuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

Dalam kesempatan yang sama, Idham menyampaikan pula dalam waktu dekat, KPU akan mengundang media massa, perwakilan masyarakat sipil, dan partai politik peserta Pemilu 2024 mengikuti uji publik rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

PDIP HORMATI PUTUSAN MK

Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

“Kami menghormati dari keputu-

san MK,” ujar Hasto saat konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis.

Ia mengaku partai berlogo banteng moncong putih itu sejak awal sudah menaruh kepercayaan pada sikap kenegarawanan dari seluruh hakim MK untuk mengambil keputusan terbaik.

Dalam mengambil keputusan itu, kata dia, hakim MK telah melihat seluruh dokumen-dokumen autentik terkait dengan amandemen UUD 1945 yang menjadi salah satu pertimbangan MK untuk mengambil keputusan.

“Kemudian, bagaimana kajian secara saksama atas sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup yang kedua-keduanya sama-sama mengandung plus minus di dalam pemilu,” jelasnya.

PENGAMAT: PUTUSAN SUDAH TEPAT

Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perkara gugatan Undang-Undang Pemilu sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku merupakan keputusan yang tepat.

“Putusan MK dengan tetap sistem pemilu terbuka sudah tepat. Sebenarnya sistem itu tidak bisa asal bongkar pasang gonta-ganti, ketika tidak cocok pemilu tertutup minta terbuka, tidak cocok terbuka minta tertutup. Oleh karena itu, tepat MK putusan tetap terbuka,” kata Panji Suminar di Bengkulu, Kamis, menanggapi putusan MK soal gugatan UU Pemilu.

Menurut Panji, ketika ada kekurangan dari sistem yang dipakai, upaya yang dilakukan bukanlah dengan mengganti sistem, namun dengan memperbaiki apa yang menjadi permasalahannya.

"Ketika kelemahan-kelemahan perbaikan dengan aturan, bukan malah mengganti sistem. Kalau mengganti

jadinya mulai dari nol kilometer lagi, sistem sudah bergerak maju, kemudian diganti lagi kembali ke nol lagi, kan tidak seperti itu," kata dia.

Dia menambahkan MK memiliki alasan yang kuat menolak untuk permohonan para pemohon soal perkara gugatan Undang-Undang Pemilu itu.

"MK punya alasan hukum yang

bagus, sebenarnya ketika memutuskan menolak itu karena mengubah sistem di tengah jalan, di tengah tahapan pemilu itu tidak mungkin. Kecuali mengubah sistem, tetapi diterapkan bukan pada 2024 ini, melainkan 2029. Tapi, putusannya tetap terbuka dan itu sudah tepat," ucap Panji. (antara/MK)

NasDem Puji Putusan MK, Sebut Teguhkan Prinsip Demokrasi dalam Pemilu

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan sistem proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024 sejalan dengan semangat demokrasi.

"Kami sangat mengapresiasi putusan MK ini. Tentu ini sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi yang selama ini dicita-citakan," kata Willy Aditya di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan sistem proporsional terbuka memberi peluang bagi para pemilih untuk memilih calon anggota legislatif lebih seksama. Hal itu juga sejalan dengan semangat demokrasi yang ingin mendekatkan rakyat dan wakil rakyat.

"Situasinya saat ini lebih memungkinkan bagi partai politik untuk menawarkan program sekaligus orang-orang yang dianggap mempunyai kapabilitas dan kapasitas memperjuangkan program yang ditawarkan. Proporsional terbuka memberi peluang lebih kepada rakyat. Ya (pemilu) ini pesta rakyat," kata dia.

Oleh karena itu, tambah Willy, putusan MK mengukuhkan praktik dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

"Sekali lagi, kita patut memberi apresiasi kepada MK. Bukan saja karena MK teguh pada konstitusi, tetapi juga telah menjadi teladan bagi lembaga yang lahir dari semangat reformasi untuk tetap konsisten pada nilai-nilai demokrasi. Itu tidak mudah di tengah berbagai tekanan politik. Nyatanya, MK membuktikan mampu melaksanakan independent judiciary (peradilan yang independen, red.)," kata Willy.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis, menolak permohonan para pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Dalam persidangan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik.

"Dalil tersebut hendak menegaskan sejak penye-



leenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi," kata Saldi Isra.

Menurut Mahkamah, dia menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar, dalil para pemohon berlebihan.

"Karena, sampai sejauh ini, partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon," ujar Saldi Isra.

Sebelumnya, MK menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI). (ant/MK)

MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu, Arteria Dahlan: PDIP Partai yang Matang dan Dewasa

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup merupakan keputusan yang luar biasa. Menurutnya, keputusan yang fenomenal ini patut diakui jika ulasan yang disampaikan oleh MK begitu komprehensif. "Ini juga merupakan bagian dari pengayaan dalam konteks kehidupan hukum khususnya kultur bernegara demokrasi," ungkap Arteria kepada para wartawan, Kamis (15/6/2023).

Dengan begitu, lanjut Arteria, pada prinsipnya PDIP sangat menghormati Keputusan MK. "Kami pastikan ini juga merupakan bagian daripada peradaban hukum dan penguatan demokrasi," terang Arteria.

"PDIP merupakan partai yang matang, partai yang dewasa. Kami tanpa putusan MK, jauh-jauh hari juga sudah siap dengan segala macam sistem pemilu. Insya Allah dengan didukung oleh kekuatan rakyat, maka kita semakin hari semakin dikuatkan," lanjutnya.

Arteria menambahkan, apa yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu merupakan pandangan DPR yang memang berbeda dengan 8 fraksi yang lain.

"Namun kami pastikan itu untuk penguatan demokrasi dan perbaikan kualitas demokrasi. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bukti konsistensi PDIP akan kekuatan historikal. Karena jika bicara mengenai demokrasi tentu



Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan

tidak bisa lepas dari perspektif historis," jelas Arteria.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa keputusan MK ini sudah memberikan kepastian hukum terkait sistem pemilu 2024 mendatang.

"Ini yang sangat ditunggu-tunggu. Ini pastinya disambut gembira oleh seluruh partai. Saya yakin PDIP juga gembira karena ini pilihan dari demokrasi," imbuhnya. (cha)



Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Sepakat dengan MK, Habiburokhman: Sistem Pemilu Jangan Terlalu Sering Diubah

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut gembira dari hasil putusan terkait Sistem Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK pada Kamis (15/6/2023).

Dirinya yang turut ikut menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut sebagai wakil dari Partai Gerindra mengungkapkan bahwa keputusan yang dikeluarkan MK sudah sangat tepat.

"Kita sudah sama-sama mendengar tadi putusan MK. Kami menyukuri bahwa putusan ini sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Habiburokhman dalam konferensi pers dengan beberapa anggota DPR RI lainnya, Kamis (15/6/2023).

Meskipun keputusan MK sudah sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, namun politikus asal Lampung ini menyisihkan beberapa catatan kecil dari hasil putusan yang dibacakan oleh para

majelis hakim MK. Salah satunya, tentang perubahan sistem pemilu.

"Ada beberapa catatan yang kami dapat namun justru bisa menjadi penguatan terhadap sistem pemilu. Salah satunya, sistem pemilu jangan terlalu sering diubah," tuturnya.

Jika memang harus dilakukan perubahan, kata dia, sesuai pandangan MK sebaiknya dilakukan beberapa tahun sebelum pelaksanaan Pemilu.

"Tapi putusan ini bagaimanapun menjadi harapan masyarakat Indonesia. Kami akui bahwa kami beberapa hari ini mendapat telepon dari berbagai daerah yang intinya rekan-rekan belum tahu sistemnya (Pemilu) seperti apa. Namun dengan adanya putusan ini maka proses Pemilu dapat terus bergerak. Aspirasi dan proses demokrasi rakyat tetap dapat berlangsung dengan baik," pungkasnya. (cha)

Supriansa: Sistem Pemilu Terbuka Masih Lebih Baik

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan untuk menolak gugatan Sistem Pemilu pada sidang putusan yang digelar di Gedung MK pada Kamis (15/6/2023). Artinya sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.

Dengan adanya putusan tersebut disambut baik oleh para politisi termasuk Anggota Komisi III DPR RI Supriansa yang mewakili Partai Golkar.

Menurutnya, keputusan ini telah memberikan gambaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kedaulatan rakyat tetap yang akan menentukan siapa saja wakil rakyat yang akan duduk di jajaran legislatif.

“Kedaulatan rakyat dan rakyat lah yang akan menentukan siapa yang akan dipilih, siapa saja wakil rakyatnya yang akan duduk di jajaran legislatif tingkat pusat, provinsi, kota maupun kabupaten,” tegas Supriansa keada wartawan pada Kamis (15/6/2023).

Dikatakan, ada beberapa hal yang menarik dari paparan putusan yang dibacakan para majelis hakim MK pada sidang hari ini. Dijabarkan bah-



Anggota Komisi III DPR RI Supriansa

wa dari sistem pemilu baik terbuka maupun tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Akan tetapi, lanjut Supriansa, jika di dalam sistem terbuka yang nanti akan dilaksanakan pada Pemilu

2024 masih ada temuan praktik “money politic”, maka akan ada tindakan tegas yakni yang bersangkutan akan langsung dicopot dari pencalonannya.

“Lebih dari itu, majelis hakim juga menjelaskan jika ada yang bermain (money politic) maka akan diadakan soal izin parpolnya,” ujarnya.

Dengan begitu, Supriansa menilai bahwa keputusan ini sudah menunjukkan arah perbaikan ke depannya.

“Kesimpulannya, sistem terbuka masih jauh lebih baik daripada tertutup. Karena ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calonnya sendiri. Dan ini juga upaya mendekatkan rakyat dengan para wakil rakyat yang dipilihnya,” tutur Supriansa.

Diketahui, MK dalam konklusinya menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, sidang putusan atas gugatan bernomor 114/PUU-XX/2022 itu gagal menjadikan pemilu sistem proporsional tertutup diberlakukan lagi. (cha)

LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

Get Your Toyota, Upgrade Your Style

AUTO2000 BONTANG

Jl. Bigeye Karasas No. 116A, Bontang No. Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD
APLIKASI M-TOYOTA

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Sistem Pemilu Diputuskan Tetap Terbuka, Irwan: Kemenangan Demokrasi dan Rakyat Indonesia

SAMARINDA - Permohonan uji materi terhadap sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan dengan nomor perkara 114/PPU-XX/2022 yang digelar hari ini, Kamis (15/6/2023).

Putusan MK menolak gugatan oleh enam orang pemohon terkait sistem proporsional terbuka atau coblos nama calon legislatif (caleg). Dalam putusan yang dihadiri delapan dari sembilan hakim konstitusi, MK menegaskan bahwa sistem pemilu tetap terbuka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu 2017. Sistem proporsional terbuka akan tetap berlaku, di mana pemilih dapat mencoblos nama caleg pada surat suara.

Keputusan MK ini mendapat tanggapan dari salah satu partai yang menolak perubahan sistem pemilu, yaitu Partai Demokrat. Irwan, anggota Fraksi Demokrat DPR RI, menyatakan bahwa keputusan MK perlu diapresiasi dan dihormati oleh semua pihak. Baginya, putusan MK ini memberikan angin segar menuju perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, karena tetap menjaga pertumbuhan demokrasi di tanah air.

"Putusan MK ini patut diapresiasi dan disambut gembira oleh rakyat. Ini adalah kemenangan demokrasi dan rakyat Indonesia. MK benar-benar menjadi benteng penjaga konstitusi Indonesia," tegasnya kepada awak media, Kamis (15/6/2023).

"Meskipun Pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan amanat reformasi 1998, kita harus tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat akan terwujud jika rakyat dapat menentukan kepada siapa mereka wakulkan aspirasinya," lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini.

Menurutnya, sistem pemilu terbuka membangun hubungan yang erat antara pemilih dan calon legislatif. Hal ini sejalan dengan misi Partai Demokrat yang berdiri di atas kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sejak awal, partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono



Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Irwan

menolak pilihan sistem proporsional tertutup karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang.

"Di internal Partai Demokrat, kami membuka ruang kompetisi yang demokratis dan sehat secara setara. Ketua Umum AHY telah meminta kader-kader Partai Demokrat untuk membangun solidaritas antara pemilih (masyarakat) dengan caleg dan partai secara sejajar," pungkasnya. **(eky)**

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim



Pemprov Tawarkan Panti Asuhan untuk Anak Jalanan di Kaltim

SAMARINDA - Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap masyarakat yang tidak jelas statusnya, atau biasa disebut anak jalanan, maka selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, siap menampung anak jalanan di Panti Asuhan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dengan demikian, anak-anak jalanan tersebut dapat dibina melalui rehabilitasi sosial. "Jika memang kabupaten/kota tidak mampu menampung, bahkan kesulitan dalam membina anak-anak jalanan, silakan bawa mereka ke panti asuhan agar kami dapat membantu dalam pembinaan," ucap Gubernur Kaltim Dr. H. Isran Noor, didampingi Kadis Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Gubernur, anak jalanan perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan agar mereka memiliki hak yang sama dalam kehidupan sebagai bangsa.

Jangan sampai, tambahnya, anak jalanan dibiarkan terlantar. Hal ini dapat mengakibatkan mereka terjerumus dalam hal-hal negatif, bahkan penyalahgunaan narkoba. "Oleh karena itu, silakan bawa mereka ke Pemerintah Provinsi. Kami siap menampung mereka," jelasnya.

Kadis Sosial Kaltim H. Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa pelayanan di dalam panti asuhan yang dibina oleh Pemprov Kaltim merupakan tanggung jawab provinsi.

"Jadi, jika di luar panti, itu semua menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Artinya, jika kabupat-



Selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi,, anak jalanan siap ditampung di Panti Asuhan yang dimiliki Pemprov Kaltim.

en/kota menemukan anak jalanan dan ingin menempatkannya di panti asuhan, silakan serahkan kepada kami," ucap Andi Ishak.

Ketika anak jalanan masuk ke Panti Asuhan, mereka akan dibina dan direhabilitasi agar menjadi individu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, serta bagi bangsa dan negara.

"Memang tidak semua kapasitas panti dapat menampung. Oleh karena itu, akan dilakukan kerja sama dengan panti-panti swasta agar dapat menampung lebih banyak anak jalanan. Prinsipnya, Pemprov akan memberikan bantuan sosial kepada anak jalanan," jelasnya.

Menurut Andi Ishak, semua ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari Gubernur Isran dan Wakil Gubernur Hadi terhadap anak jalanan yang tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas.

"Semoga perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur ini dapat membawa anak jalanan menjadi individu yang benar-benar bermanfaat," harapnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim sedang melakukan renovasi sejumlah panti jompo, termasuk panti apung di Samarinda agar dapat menampung lebih banyak orang dengan kapasitas hingga 50 orang. ([adpim/adv/diskominfo kaltim](#))



Diskominfo Kaltim Dorong Penggunaan Konten Kreatif dalam Media Sosial

YOGYAKARTA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim), Muhammad Faisal, menyampaikan pentingnya optimalisasi ide konten kreatif dalam penyampaian informasi.

Sebab saat ini, penyebaran arus informasi begitu cepat dan masif di hampir semua platform digital, terutama media sosial. Instansi pemerintahan sebagai corong informasi resmi bagi masyarakat harus mampu menyajikan konten kreatif agar masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menyerap informasi yang disampaikan.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan materi dengan tema "Pengelolaan Media Sosial Melalui Optimalisasi Ide Konten yang Kreatif dan Komunikatif" dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengolahan, Penyajian, Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan-Non Perizinan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Faisal juga memaparkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 78,19 persen, atau sebanyak 215 juta penduduk Indonesia

yang terkoneksi internet dari total populasi sebesar 275 juta.

"Dari jumlah sebanyak itu, tidak ada lagi alasan kita tidak digital. Harus digital dalam menyampaikan informasi, karena digitalisasi semakin cepat beradaptasi dengan manusia di semua usia dan strata. Sudah saatnya kita bergerak secara sistematis dan terukur, dan menembus batas wilayah tanpa batas global," terang Faisal di hadapan para peserta FGD yang digelar oleh DPMPSTSP Kaltim, Kamis (15/6/2023).

Di samping itu, menurut praktisi humas pemerintahan ini, penyajian konten kreatif melalui media sosial memiliki banyak manfaat bagi pemerintah. Pertama, dapat menjadi media komunikasi diseminasi dan engagement. Kedua, sebagai media promosi dan publikasi, memberikan feedback dan analisis demografi, serta branding instansi.

"Terlebih DPMPSTSP bergerak di bidang investasi. Sampaikanlah informasi angka-angka itu dengan menarik. Salah satunya melalui infografis. Itu adalah cara paling efisien untuk menyajikan data dan informasi

dalam format yang lebih mudah dicerna," terang Faisal yang telah lama berkutat di dunia kehumasan.

Fungsi infografis dimaksudkan untuk menyajikan informasi kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami pembaca. Tips untuk membuat infografis yang menarik adalah dengan melakukan riset data dan sumber informasi, menentukan audiens, lalu mendesain dan memvisualisasikan data dengan template infografis yang menarik.

"Setelah itu, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan konten kreatif kita di platform digital. Periksa lalu lintas website dan media sosial, pahami selera pengikut, dan lihat sejauh mana kekuatan konten kita," pungkasnya.

Di akhir sesi pemaparan, Faisal juga mengajak para peserta untuk berpikir kreatif dari kejelian mengamati sesuatu. Ia menyajikan contoh beberapa gambar kreatif yang bisa diadaptasi sebagai sebuah konten kreatif. (**KRV/pt/diskominfo kaltim**)



Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia, Kaltim Raih Pengakuan Eliminasi Malaria

PENAJAM - Gubernur Kaltim Dr. H. Isran diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Jaya Mualimin menghadiri peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS) Tahun 2023 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis, 15 Juni 2023.

Kegiatan HMS 2023 dengan tema "Dengan Investasi, Inovasi, dan Implementasi, Kita Capai Indonesia Bebas Malaria" dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada lima Gubernur dan 30 Bupati/Wali Kota yang daerahnya telah memenuhi persyaratan Eliminasi Malaria oleh Menteri Kesehatan, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur Isran Noor mengucapkan selamat datang di Benua Etam kepada Menteri Kesehatan RI beserta para Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Titik Nol IKN, Sepaku, guna merayakan puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2023.

"Hari Malaria Sedunia yang kita peringati hari ini merupakan kesempatan untuk menguatkan komitmen dan upaya bersama dalam mengatasi salah satu tantangan kesehatan yang serius di negara kita, yaitu penyakit malaria," katanya, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam.

Menurut Gubernur, malaria merupakan penyakit menular yang tel-

ah merenggut banyak nyawa dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.

"Hari ini saya merasa senang menyaksikan momen yang sangat bersejarah, yaitu penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria oleh Menteri Kesehatan RI, sebagai pengakuan atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan masyarakat Kaltim dalam memerangi malaria," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, menegaskan sesuai komitmen global (SDGs) bahwa semua negara harus bebas malaria atau mencapai target eliminasi malaria pada tahun 2030.

"Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya katakan jangan menunggu tahun 2030, dan kami sangat mengapresiasi komitmen Kalimantan Timur untuk mencapai eliminasi pada tahun 2026. Ini adalah semangat yang luar biasa dan sangat rasional, karena tinggal empat kabupaten," ungkapnya.

IKN dipilih sebagai pusat peringatan Hari Malaria Sedunia sebagai upaya untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat baru dalam mencapai Indonesia yang Sehat dan Bebas Malaria.

Saat ini, lanjutnya, wilayah timur Indonesia memiliki tingkat kejadian yang tinggi, karena 80 persen kasus malaria berasal dari provinsi-provinsi di wilayah timur.

"Secara keseluruhan, sudah ada lima provinsi yang kabupaten dan kotanya bebas malaria, seperti DKI

Jakarta, Bali, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat," sebutnya.

Oleh karena itu, dia berharap semua pihak terlibat, terutama para pemimpin daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur, untuk menggerakkan semua potensi dan sektor lintas dalam menciptakan daerah eliminasi malaria.

"Target dalam RPJMN 2024 adalah 405 kabupaten dan kota yang harus mencapai eliminasi, dan sisanya akan menjadi target di RPJMN berikutnya. Saat ini, sudah ada 381 kabupaten dan kota yang mencapai eliminasi, dan target 2024 hampir tercapai," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, secara simbolis menyerahkan perangkat pemeriksaan malaria kepada Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, H. Alimuddin. Selain itu, juga dilakukan penyerahan piala bergilir Lomba Mikroskopis dan penghargaan Malaria Champion.

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 25 April, namun kali ini dipusatkan di Titik Nol IKN selama tiga hari, yaitu Rabu hingga Jumat (14-16 Juni). Acara ini juga diisi dengan pembacaan komitmen Bebas Malaria Provinsi Kaltim Tahun 2026 oleh perwakilan Bupati/Wali Kota se-Kaltim, serta pembacaan komitmen Gubernur dan Bupati/Wali Kota penerima Sertifikat Eliminasi Malaria. (**advpim/adv/diskominfo kaltim**)

Gubernur Isran Serahkan Penghargaan Proper, Adiwiyata, dan Kalpataru

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (15/6).

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diiringi dengan penyerahan penghargaan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan Adiwiyata, dan Kalpataru tingkat Provinsi Kaltim oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Isran Noor.

Sebanyak 265 perusahaan menerima penghargaan Proper untuk pengelolaan lingkungan hidup periode penilaian 2022-2023, termasuk dari sektor industri jasa, kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan.

Dari hasil penilaian, terdapat 14 perusahaan dengan peringkat emas, 103 perusahaan dengan peringkat hijau, 127 perusahaan dengan peringkat biru, dan 21 perusahaan dengan peringkat merah.

Selain itu, terdapat penghargaan Kalpataru untuk 8 tokoh tingkat provinsi yang diakui sebagai perintis dan penyelamat lingkungan, serta penghargaan Adiwiyata untuk 44 sekolah di Kalimantan Timur yang berhasil menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah.

Isran berharap apa yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi lingkungan, khususnya di Kaltim. "Kaltim memiliki peran yang besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tidak hanya secara nasional, tetapi juga global," katanya.

Isran mengucapkan selamat kepada penerima Proper dan menekankan pentingnya peringkat kinerja perusahaan yang menjadi acuan untuk perbaikan.

Gubernur juga mencatat peningkatan dalam peringkat kinerja perusahaan, dengan semakin banyak perusahaan yang meraih peringkat emas dan peningkatan



dari peringkat merah ke biru serta dari biru ke hijau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal, dalam laporannya menyebutkan bahwa jumlah peserta Proper pada periode penilaian mencapai 265 peserta, dengan 78 peserta dari sektor industri jasa, 85 peserta dari sektor kelapa sawit, 83 peserta dari sektor pertambangan batu bara, dan 19 peserta dari sektor kehutanan.

Penilaian dilakukan mulai dari 20 Februari hingga 17 Mei 2023, dengan mekanisme penilaian meliputi verifikasi lapangan dan penilaian dokumen mandiri, serta pemaparan kinerja unggulan pada 19-20 Mei.

Pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta pengenda-

lian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan di Kaltim pada khususnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi juga diperlukan dukungan kemitraan serta kolaborasi dari kalangan stakeholder dan masyarakat agar berjalan seimbang.

Karenanya, permasalahan hubungan bukanlah hanya milik satu negara akan tetapi permasalahan itu adalah milik bersama penduduk dunia.

Tampak Hadir, Sekretaris Diskominfo Kaltim Hermawanto, Perangkat Daerah Kaltim, DLH Kabupaten dan Kota, Pimpinan Perusahaan serta Pimpinan lembaga Pendidikan. (Prb/ty/diskominfo kaltim).



YAHYA/MEDIA KALTIM

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dedy Haryanto dan Kadis KP3A saat pelaksanaan peran partisipasi perempuan.

Keterlibatan Perempuan Rendah, Pemerintah Dukung Peran Partisipasi Perempuan dalam Publik

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang (DPPKB) bersama DKP3A Provinsi Kaltim menggelar sosialisasi partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi. Ini merupakan bentuk dukungan kepada perempuan baik di Kaltim maupun di Kota Bontang.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Soroyalita mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk dukungan dalam pemberdayaan perempuan untuk partisipasi dalam politik, hukum dan kewenangan provinsi.

Ia menjelaskan, bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kaltim masih terbelah rendah, yakni di urutan 3 terbawah seluruh Indonesia.

"IPG Kaltim rendah karena adanya kesenjangan antara IMP laki-laki dan IPM perempuan yang terpaut

jauh," kata Noryani Soroyalita saat membuka kegiatan sosialisasi, Kamis (15/6/2023) di Hotel Bintang Sintuk.

Lebih jauh, Noryani mengatakan untuk tahun 2023 ini, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan.

"Selain itu, pada tahun 2023 ini IDG kita mengalami kenaikan sebesar 0,25 walaupun tidak cukup signifikan dan tidak mengubah posisi Kaltim. Ini menjadi tugas kita bersama," kata Noryani.

Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dedy Haryanto mengatakan, dengan dilaksanakan pengetahuan politik bertujuan untuk pendidikan politik bagi perempuan, antara lain meningkatkan pengetahuan tentang konsepsi gender, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender, penguatan komitmen, sinergi dan keterlibatan

perempuan dalam pembangunan, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan.

"Perempuan mulai bangkit, membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan, mulai dari kecerdasan perempuan-perempuan Indonesia umumnya yang telah berperan ganda dan berkiprah dalam pembangunan, dan telah turut berkontribusi terhadap pembangunan di berbagai bidang politik, hukum, budaya, ekonomi," kata Dedi Hariyanto.

Dedi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama calon legislatif perempuan, yang kemudian dapat mendorong peningkatan perempuan di semua bidang pembangunan sesuai yang dimandatkan Presiden RI dan menjadi strategi arah kebijakan Kementerian PPPA RI. (adv/yah)



HUMAS DPRD BERAU

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

Sakirman Apresiasi Putusan MK Menolak Proporsional Tertutup

TANJUNG REDEB - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mengaku mengapresiasi putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, sehingga pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Dia mengatakan, keputusan MK yang tidak mengabulkan permohonan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertu-

tup merupakan kabar gembira bagi demokrasi Indonesia.

"Terutama hal tersebut juga membuka ruang partisipasi publik dalam pemilu untuk dipilih dan memilih," ungkapnya, Kamis (15/6/2023).

Menurut Sakirman, putusan MK terkait uji materi sistem pemilu ini pantas diapresiasi dan dipuji oleh publik. "Terlebih di tengah melemahnya tingkat kepercayaan publik, putusan MK yang tetap konsisten menjadikan sistem pemilu sebagai ranah open legal policy patut diapresiasi," tuturnya.

Dirinya menerangkan, penentuan sistem pemilu merupakan isu teknis, bukan isu konstitusional.

Hal ini merupakan ranahnya para pembentuk undang-undang.

"Apabila sistem pemilu diubah di tengah jalan, ini bisa menimbulkan kekacauan politik dan ketatanegaraan," tegasnya.

Politikus Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, masyarakat perlu sama-sama menyadari bahwa sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari hasil Reformasi yang dulu diperjuangkan.

"Kita apresiasi putusan MK menolak proporsional tertutup pada Pemilu 2024 nanti. Semoga demokrasi kita ke depannya menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suriani menyoroti warga Balikpapan Timur yang belum mendapatkan pemasangan baru air bersih dari PTMB

Warga Balikpapan Timur Kesulitan Lakukan Pemasangan Air Bersih

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menyoroti kesulitan pemasangan air bersih untuk pelanggan di kawasan Balikpapan Timur (Baltim) yang hingga saat ini belum terlaksana.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suriani, mengatakan bahwa mayoritas warga Baltim mengeluhkan sulitnya mendapatkan pemasangan sambungan air bersih baru di rumah mereka, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Banyak warga Baltim yang mengeluhkan hal ini, dan kami akan mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencari

solusi dan tindak lanjutnya," ujarnya pada Kamis (15/6/2023).

Suriani menjelaskan bahwa sudah banyak warga Baltim yang mengajukan permohonan pemasangan sambungan air bersih baru, namun hingga saat ini permintaan mereka belum terlayani.

"Balikpapan Timur memiliki jumlah warga terbanyak dalam daftar tunggu. Padahal saya sudah menanyakan hal ini kepada Wali Kota," jelasnya.

Menurutnya, waduk Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) berada di kawasan Balikpapan Timur, namun masih menjadi pertanyaan

mengapa banyak warga Balikpapan Timur yang belum merasakan fasilitas air bersih yang disediakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

"Penampungan waduk berada di Balikpapan Timur, tetapi mengapa warganya yang paling banyak tidak terpasang?" tambah Suriani.

Layanan air dari PTMB belum dapat mencakup semua rumah warga di lokasi yang sama, meskipun lokasinya berdekatan. Suriani optimis akan mengawal proses ini hingga dapat direalisasikan. (ADV/ DPRD Balikpapan/Bom)



Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto

DPRD Balikpapan Pertanyakan Kelanjutan Restribusi Pajak Central Park ke BPPDRD

BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kota Balikpapan masih menunggu laporan dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mengenai retribusi pajak parkir yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga, yaitu Central Park dari PT Pelindo Balikpapan.

Sejak menjalin kerjasama pada tahun 2020 dengan Pelindo Balikpapan, Central Park tidak pernah melaporkan omset pendapatannya kepada BPPDRD Balikpapan. Padahal, sesuai Perda Balikpapan, mereka wajib melaporkan dan menyetorkan 30 persen dari pendapatan tersebut kepada pemerintah daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lanjutan dari BPPDRD mengenai pembayaran pa-

jak Central Park. "Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, mereka masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat. Kami akan menanyakan kembali mengapa hal ini belum terealisasi sampai saat ini," ujarnya pada Kamis (15/6/2023).

Suwanto menjelaskan bahwa ini adalah masalah yang telah berlangsung cukup lama, namun Komisi II tetap berusaha untuk menghubungi pihak Pelindo dan BPPDRD untuk mengetahui tindakan yang telah dilakukan, termasuk mencapai target dan pembayaran.

"Kami mendapatkan laporan bahwa pihak ketiga telah memberikan balasan surat kepada Dispenda. Ini menandakan adanya perkembangan," jelasnya.

Untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan terus berupaya agar pi-

hak ketiga membayar pajak kepada pemerintah daerah, sesuai dengan kewajibannya. "Kami akan meminta lagi, dan kami minta BPPDRD untuk mengirim surat kepada pihak ketiga, karena proses ini harus dilakukan secara tertulis," tambah Suwanto.

Sekretaris BPPDRD Balikpapan, Idham, mengatakan bahwa setelah melakukan inspeksi beberapa waktu lalu, Central Park hingga saat ini belum memberikan jawaban. Mereka bahkan mengklaim masih berkoordinasi dengan pusat di Makassar.

"Hingga saat ini, setelah lebaran, tidak ada kemajuan. Kami akan mengirimkan surat peringatan sesuai dengan peraturan daerah," kata Idham singkat. **(ADV/DPRD Balikpapan/Bom)**



Upaya Pemkab Kukar, Kerjakan Jalan Kabupaten Berkualitas Mantap

TENGGARONG - Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (DPU Kukar) terus melakukan pekerjaan terkait pemantapan kualitas jalan di Kukar. Baik itu berupa pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan kabupaten secara berkala.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU Kukar, Restu Irawan, progres pemantapan jalan sepanjang 49,33 kilometer (km) akan dikejar dan dituntaskan hingga akhir 2023. Bahkan jika memungkinkan, akan bertambah 10-20 km lagi melalui plot anggaran di APBD Perubahan Kukar 2023. "Progres yang berada di bawah bidang penyelenggaraan jalan sudah hampir rampung, tinggal 5-10 persen lagi yang sedang berproses menuju (tahapan) kontrak," ungkap Restu.

Bahkan hingga akhir Mei lalu, berdasarkan data yang dihipunnya, hanya sebanyak 10 kegiatan yang belum masuk tahapan lelang. Dimana terdapat 1 kegiatan skala besar, 9 kegiatan sisanya merupakan kegiatan proyek skala kecil.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Bina Marga DPU Kukar, untuk pemeliharaan jalan ada sepanjang 49,33 km jalan kabupaten yang dipelihara, Restu mengatakan 12,2 km jalan yang diprioritaskan untuk dikerjakan.

Untuk pembangunan jalan kabupaten, setidaknya jalan sepanjang 1,43 km yang akan dikerjakan, dari total 6,33 km. Yakni pembangunan jalan menuju RSUDAM Parikesit Kukar, jalan penghubung 5 desa di Desa Sungai Lunuq Kecamatan Tabang dan pembangunan Jalan Desa Kuyung-Kayu Batu. Untuk jalan kabupaten yang direkonstruksi dan ditingkatkan, akan dikerjakan sepanjang 32,55 km.

Meski tidak merinci secara jelas, dikatakannya untuk merampungkan seluruh target hingga jalan di Kukar berstatus mantap, setidaknya teranggarkan senilai Rp 300-400 miliar di tahun 2023 ini.

Untuk penanganan berupa peningkatan jalan yakni di ruas Jalan Poros Kahala yang menjadi penyelesaian ruas jalan daerah hulu dengan nilai Rp 35 miliar, ruas jalan di Desa Kedang Ipil sebagai infrastruktur pendukung kecamatan baru Kota Bangun senilai Rp 15 miliar. Selanjutnya ruas jalan penghubung Kecamatan Anggana - Muara Badak di Kecamatan Anggana senilai Rp 19,4 miliar, ini menjadi konektivitas menuju rumah sakit Muara Badak.

Konektivitas menuju Kantor Kecamatan Muara Jawa di Jalan Tamapole senilai Rp 7,4 miliar. Peningkatan badan jalan di Muara Kaman Ilir menuju Desa Benua Puhun senilai Rp 1 miliar, ini jadi penanganan peningkatan perkerasan jalan akses menuju Kecamatan Muara Kaman. Dengan hitungan total anggaran yang



ISTIMEWA

Kabid Bina Marga DPU Kukar, Restu Irawan

dikurcurkan senilai Rp 77,8 miliar.

Selain itu, ada 5 titik rekonstruksi jalan yang dikerjakan tahun 2023. Masing-masing penyelesaian ruas jalan daerah hulu Desa Sebelimbangan-Pandamaran senilai Rp 18 miliar. Rekonstruksi Jalan Senoni-Rapak Lambur senilai Rp 14 miliar, rekonstruksi Jalan Lamin Pulut-Teluk Bingkai senilai Rp 5 miliar.

Rekonstruksi Jalan Simpang Tower Desa Batu-Batu menuju Desa Salo Cela yang berasal dari Bankeu sebesar Rp 5 miliar, berupa pengerasan permukaan jalannya. Dan penanganan longsor Desa Sebulu Modern-SP 1 senilai Rp 5 miliar. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 47 miliar.

Sementara untuk pembangunan jalan kabupaten, ada dua titik yang disasar. Yakni pelebaran jalan dalam kota Tenggarong di Jalan Mayjen Sutoyo - Jalan KH Dewan-tara senilai Rp 28 miliar dan pelebaran Jalan Ahmad Yani senilai Rp 25 miliar dengan total anggaran Rp 53 miliar.

"Jadi semua ini kan terbagi secara proporsional di Kukar, untuk pembangunan dan peningkatan jalan ini kita rata-rata di wilayah hulu. Karena merubah tipe pengerasan yang rata-rata masih agregat, akan dibeton dan diaspal," tutupnya. (adv/afi)



Dorong Pola Hidup Sehat, Pupuk Kaltim Tingkatkan Kesadaran Karyawan Akan Penyakit Jantung

JAKARTA - Tingkatkan taraf kesehatan karyawan dan keluarga besar Perusahaan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) gelar seminar kesehatan bertajuk "Jantung Sehat Stamina Kuat" bersama dr Sony Hilal Wicaksono, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS Pondok Indah Jakarta.

Kegiatan diikuti ratusan peserta dari karyawan dan Persatuan Istri Karyawan Pupuk Kaltim (PIKA PKT), berlangsung di Gedung Wijaya Kusuma Kantor Pusat Pupuk Kaltim, Jumat (9/6/2023).

SVP Teknologi Pupuk Kaltim Achmad Rois, mengungkapkan seminar kesehatan ini merupakan agenda rutin perusahaan dalam mendorong pola hidup sehat (healthy lifestyle) bagi karyawan dan keluarga, sekaligus upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan pelayanan preventif agar potensi penyakit khususnya jantung bisa diantisipasi sejak dini.

Hal ini mengingat tingkat morbiditas dan mortalitas penyakit jan-

tung yang terbilang sangat tinggi di Indonesia, sehingga turut menjadi perhatian Pupuk Kaltim agar bisa tertangani dan diantisipasi dengan baik oleh seluruh karyawan beserta keluarga.

"Meski dilingkungan Pupuk Kaltim tidak mendominasi, tapi jika melihat statistik morbiditas dan mortalitas, penyakit jantung patut diwaspadai sejak dini. Hal ini menjadi salah satu konsen Pupuk Kaltim terhadap perlindungan kesehatan karyawan dan keluarga," ujar Achmad Rois.

Dirinya pun menyebut kegiatan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi karyawan beserta keluarga, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mendorong pola hidup sehat di lingkungan Pupuk Kaltim. Sehingga kedepan, peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan dapat terus meningkat seiring makin optimalnya taraf kesehatan karyawan.

"Dari seminar ini, kita bisa mendapat pemahaman yang tak hanya tentang cara hidup sehat, tapi

bagaimana bisa menjalani hidup yang lebih baik kedepannya," kata Achmad Rois.

Menurut Achmad Rois, sejauh ini Pupuk Kaltim terus berupaya maksimal dalam meningkatkan taraf kesehatan karyawan beserta keluarga, diantaranya rutin memberikan edukasi untukantisipasi serta penanganan berbagai jenis penyakit yang timbul, hingga program kesehatan guna meningkatkan budaya olahraga secara teratur dan berkesinambungan.

Salah satunya program Virtual Running, Walking and Cycling (VIRAL) yang terus dikembangkan bagi seluruh karyawan dan keluarga, dengan jumlah kepesertaan yang meningkat setiap tahun. Hal ini wujud keseriusan Pupuk Kaltim dalam mendorong pola hidup sehat karyawan, minimal dengan olahraga ringan seperti berlari, jalan kaki dan bersepeda.

"Untuk lebih memotivasi, Pupuk Kaltim juga memberikan reward bagi peserta VIRAL yang menca-



pai target di tiap triwulan, sehingga kedepan bisa terus ditingkatkan untuk membudayakan olahraga secara teratur," tandas Achmad Rois.

Pada kesempatan itu, turut dilakukan pengundian pemenang VIRAL periode triwulan 4 tahun 2022 kategori Karyawan dan Keluarga. Serta pemenang program Aku Mau Sehat kategori FIFO dan HIFIT, periode triwulan 4 tahun 2022. Achmad Rois pun mengimbau karyawan dapat lebih aktif dalam mengikuti dua program ini, sehingga kedepan pola hidup sehat makin membudaya di lingkungan Pupuk Kaltim.

"Kami pun mengimbau karyawan dapat semakin aktif mengikuti program VIRAL, agar fit to work di Pupuk Kaltim yang saat ini sudah baik bisa lebih kita tingkatkan," ucap Achmad Rois.

Sementara dr Sony Hilal Wicaksono, dalam paparannya menyam-

paikan jika penyakit jantung hingga saat ini menduduki peringkat pertama kematian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Aterosklerosis, yakni penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah.

Kondisi ini menjadi penyebab umum penyakit jantung koroner (atherosclerosis heart disease), yang baru muncul dan diketahui saat aliran darah ke organ atau jaringan tubuh terhambat.

"Penyempitan pembuluh darah akan menghambat suplai oksigen serta nutrisi ke organ tubuh. Hal ini membuat fungsi organ menurun bahkan terhenti, tergantung seberapa parah penyempitan yang terjadi," terang dr Sony.

Untuk itu, perlu diwaspadai sejumlah hal untuk menekan potensi Aterosklerosis terjadi seperti In-

deks Massa Tubuh (IMT) agar tidak overweight, fungsi ginjal, kolesterol hingga EKG Abnormal. Dimana EKG Abnormal dapat menandakan bahwa satu atau lebih aspek dinding jantung lebih besar dari yang lain.

Ini bisa dimaknai bahwa jantung bekerja lebih keras dari biasanya untuk memompa darah, yang diakibatkan level gangguan fungsional dan penebalan dinding jantung, kekurangan oksigen hingga berdampak pada irama jantung yang tidak teratur.

"Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah Aterosklerosis diantaranya menghindari makanan berlemak dan memulai diet sehat rendah lemak jenuh dan kolesterol, rutin berolahraga tiap hari, menghentikan kebiasaan merokok, belajar mengendalikan stres hingga menjaga berat badan ideal," papar dr Sony. (adv)



Berikan Rasa Aman, Satpol-PP PPU Turut Amankan Barang Jemaah Haji

PPU - Untuk menjamin ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat keberangkatan haji Penajam Paser Utara (PPU), Satpol-PP PPU mengerahkan tim pengamanan.

Plt Kepala Satpol-PP PPU, Arifin, menuturkan bahwa dalam rangka memastikan kegiatan pemberangkatan jamaah haji asal PPU berjalan lancar, pihaknya melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap barang bawaan Jemaah Haji 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU, pada Selasa (13/6/2023).

"Satpol-PP PPU dalam pemberangkatan ratusan jemaah haji, juga mengerahkan armada menggunakan dua truk dalmas," ujarnya, Kamis (15/6/2023).

Tak hanya itu, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) penegak peraturan daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada) yang mengedepankan humanisme, personelnya juga memberikan bantuan khusus, seperti pengangkutan koper jemaah haji.

"Tim melakukan pemindahan koper jemaah haji ke kendaraan meng-



SATPOL-PP PPU

Personel Satpol-PP PPU saat melakukan pengangkutan dan pengecekan koper para jemaah haji PPU.

gunakan dua truk dalmas, sebagai persiapan pemindahan, dengan jumlah 123 koper," ucapnya.

Pihaknya juga melakukan pengecekan barang, hal ini untuk memastikan semua barang bawaan calon jemaah haji sudah lengkap.

Arifin berharap, seluruh calon jemaah haji ini dapat melaksanakan

ibadah dengan baik dan lancar, serta kembali dengan selamat ke tanah air.

"Semoga seluruh perjalanan ibadah berjalan lancar tanpa hambatan hingga kembali nanti. Semoga semua jemaah menjadi haji yang mabrur," pungkas Arifin. (ADV/SBK)





PT Supra Bara Energi Raih PROPER Hijau 2023

SAMARINDA - PT Supra Bara Energi (PTSBE) meraih peringkat PROPER Hijau untuk kinerja lingkungan periode 2022-2023. Peringkat PROPER Hijau untuk PTSBE diberikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan PROPER, Adiwiyata dan Kalpataru oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

Dalam sambutannya Gubernur Isran Noor mengatakan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam pendapatan devisa negara.

"Surplus pendapatan devisa dari kegiatan usaha di Kaltim adalah USD32 miliar pada 2022 terutama dari industri pertambangan," kata Gubernur Isran Noor.

Terkait peringkat PROPER tahun ini, Gubernur Isran Noor memberikan apresiasi. "Tahun ini tidak ada peringkat Hitam. Terima kasih kepada semua," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal mengatakan acara Penganugerahan Penghargaan PROPER, Adiwiyata dan Kalpataru merupakan puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2023.

"Tema Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2023 adalah Solusi untuk Polusi Plastik," kata Kadis LH Provinsi Kaltim Rafiddin Rizal.

Terkait PROPER, Rafiddin menjelaskan program periode 2022-2023 diikuti oleh 265 perusahaan. "Sebanyak 83 peserta merupakan tambang batubara Kaltim," tambah Rafiddin.

PROPER PTSBE

Bagi PTSBE, perolehan tahun ini merupakan peringkat PROPER Hijau ketiga yang diterima oleh perusahaan barubara ini.

"Kami sangat senang tahun ini bisa meraih peringkat PROPER Hijau lagi," kata Irjen Pol (Purn) Tri Agus Heru Prasetyo, manajemen PTSBE usai acara pengumuman peringkat PROPER.

Dikatakannya, raihan PROPER Hijau ini merupakan bukti kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. "Raihan PROPER Hijau ini dicapai berkat bimbingan Dinas LHK dan kinerja seluruh karyawan PTSBE," tambah Tri Agus.

Dijelaskannya, raihan PROPER Hijau ini semakin memberikan motivasi kepada perusahaan dan karyawan. "Kami akan terus mening-

katkan kinerja kami di bidang pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial," jelas Tri Agus.

PROPER HIJAU

Korporat yang termasuk ke dalam PROPER Hijau merupakan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari persyaratan. Selain itu, korporat PROPER Hijau juga telah memiliki keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan.

Korporat juga telah memiliki program 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air. Di samping itu perusahaan juga sudah memiliki program efisiensi emisi dan efisiensi energi.

Grup Mitra Jaya, PT SBE mengoperasikan tambang batubara di Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. PT SBE beroperasi sejak 2010 dan mempekerjakan sekitar 500 karyawan. Sebagian besar karyawan PTSBE direkrut dari desa-desa sekitar tambang dan Kabupaten Berau.

Selain tambang batubara dan emas, Grup Mitra Jaya memiliki usaha di bidang usaha konstruksi, jalan tol, farmasi dan properti. (rls/dez)

Mahasiswa Terlibat Kasus Ganja di Balikpapan, Ditangkap Polda Kaltim

BALIKPAPAN - Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polda Kaltim menangkap seorang pria berinisial MS (21) yang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Balikpapan, pada Rabu (14/6/2023).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan bahwa MS ditangkap di salah satu lokasi jasa ekspedisi pengiriman barang sekitar pukul 18.30 WITA. MS diketahui baru saja mengambil sebuah barang miliknya.

"Adanya laporan masyarakat yang menyebutkan ada seseorang akan mengambil barang melalui jasa ekspedisi. Dan tim operasional mengintai siapa pemilik barang tersebut," ujarnya, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, setelah ditunggu dan bekerja sama dengan jasa ekspedisi tersebut, tibalah MS yang mengambil barang tersebut. Petugas pun langsung mengamankan MS dan barang tersebut.

"Setelah diperiksa dan disaksikan oleh warga dan jasa ekspedisi, ternyata paket tersebut berupa bungkus berwarna silver yang berisi ganja," jelasnya.

Pelaku tidak dapat mengelak lagi setelah dibuktikan bahwa paket tersebut merupakan barang terlarang, di mana ganja tersebut memiliki berat 113,19 gram.

"Saat ini pelaku MS telah berada dalam tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk menjalani



Pelaku MS beserta barang bukti ganja sebanyak 113,19 gram.

pemeriksaan lebih lanjut," tambah Yusuf.

MS pun terancam hukuman penjara selama 5 tahun, polisi menjerat MS dengan Pasal 114 ayat (1) subside Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Bom)

LET'S GO **ALYOKO!**

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

member of ASTRA

Bantuan Toyota lebih mudah!

Bontang

Nasib Malang Debt Collector di Kukar. Ditikam Saat Tagih Utang, Nyawanya Melayang

TENGGARONG - Nasib siap dialami, Supriaji Slamet (40), harus merenggang nyawa saat menagih utang salah nasabah di Jalan Poros Blok F37/38 Afdeling ECHO, areal PT Sawit Kaltim Lestari (SKL)/KencanaGroup, tepatnya di Desa Sabintulung, Muara Kaman. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (14/6/2023) pukul 22.30 WITA.

Ia menerima dua kali tikaman, yang masing-masing mendarat di lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri. Tusukan ini dilayangkan oleh RL (40), lantaran tersulut emosi akibat perkataan tak mengenakkan dan kasar dari korban. Diketahui, korban merupakan seorang debt collector perusahaan elektronik di Samarinda.

"Menurut keterangan saksi saat berjaga di pos 1 Security PT SKL, korban datang ke pos security dalam kondisi bersimbah darah untuk meminta pertolongan dan men-

yampaikan bahwa sedang diikuti orang," ujar Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena, Kamis (15/6/2023).

Saat diinterogasi, pelaku mengungkapkan bahwa dirinya belum mampu membayar angsuran yang sudah tertunggak selama dua bulan. Ia menyebutkan alasan istri pelaku yang baru saja melahirkan, sehingga membutuhkan dana tambahan. Bahkan, pelaku sebenarnya telah mempersilakan korban untuk membawa barang yang belum dibayar, namun korban bersikeras untuk meminta pembayaran dalam dua hari ke depan.

Karena ucapan korban dianggap keterlaluan, pelaku kehilangan kendali. Ia segera mengambil pisau dari dapurnya dan mengejar korban menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil menghentikan motor korban, pelaku langsung menusukkan pisau ke tubuh korban sebanyak dua kali.

Korban segera dilarikan ke UPTD Puskesmas Muara Kaman. Namun sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan diduga telah menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju puskesmas. Diduga, korban meninggal dunia akibat pembekuan darah akibat luka tusukan pisau di bagian rusuk sebelah kiri.

Pihak medis di UPTD Puskesmas Muara Kaman menyimpulkan bahwa korban diduga meninggal dunia karena pembekuan darah setelah pemeriksaan fisik luar. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD AM Parikesit Kukar.

Pelaku kini berada dalam tahanan Mapolsek Muara Kaman. Ia terancam dengan Pasal 351 KUHP Ayat 3 Juncto Pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. (afi)



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya
Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

**Kode Promo
BTSOLI**

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Bentuk Pokmaswas, Upaya Kelurahan Loa Ipuh Tekan Illegal Fishing

TENGGARONG - Kelurahan Loa Ipuh terus berupaya untuk menekan dan meminimalisir aktivitas illegal fishing. Terutama di aliran anak Sungai Mahakam yang ada di Kelurahan Loa Ipuh. Salah satunya berencana membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Memastikan tidak ada masyarakat nakal yang menggunakan alat tangkap berbahaya.

Ini pun senada dengan upaya sosialisasi dari Satpol PP Kukar. Terkait Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2017, terkait pengelolaan penangkapan ikan, yang dilakukan Satpol PP Kukar belum lama ini. Disamping keinginan untuk menyediakan lokasi pemancingan yang dibalut dengan wisata susur sungai.

"Rencana pengawasan illegal fishing ini sebagai upaya pelestarian lingkungan di sekitar sungai Loa Ipuh," jelas Erri Suparjan, lurah Loa Ipuh.

Lebih lanjut, setelah terbentuknya Pokwasmas Loa Ipuh, bersama dengan karang taruna akan turun melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan cara melakukan pembersihan anak Sungai Mahakam yang mengalir di sepanjang Kelurahan Loa Ipuh. Terutama dari sampah-sampah rumah tangga yang dibuang masyarakat.

Karena jika berbicara potensi perikanan, cukup besar, tetapi sejauh ini tidak termanfaatkan dengan baik. Sebut saja ikan predator jenis Toman yang memang banyak ditemukan di anak Sungai Mahakam di Loa Ipuh. Memiliki peminat pemancingnya sendiri.



ISTIMEWA

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan

Maka dari itu, Erri pun bakal menggandeng Pokwasmas dan karang taruna untuk menyiapkan konsep yang akan digarap bersama.

"Sehingga nanti bisa menjadi surganya para pemancing di sungai Loa Ipuh itu. Kedepannya, Insya Allah kita akan bikin lomba mancing di sungai Loa Ipuh," ungkap Erri lagi.

"Jadi ada beberapa manfaat, bisa kita bikinkan wisata. Jadi ada beberapa sektor ekonomi yang bisa kita hidupkan nantinya," pungkasnya. (afi)



ISTIMEWA



Paser Perketat Masuknya Hewan Ternak Jelang Idul Adha

PASER - Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser akan memperketat pengawasan terhadap hewan ternak yang akan masuk ke Kabupaten Paser menjelang perayaan Idul Adha. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Pemberlakuan ketat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Paser berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepala Disbunak Kabupaten Paser, Djoko Bawono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya pencegahan.

Dalam beberapa wilayah, selain Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sebelumnya telah menyebar,

penyebaran virus LSD juga berpotensi menyerang hewan ternak. Terlebih lagi, menjelang peringatan Idul Adha, permintaan akan hewan ternak dipastikan akan meningkat.

“Petugas di lapangan perlu melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyebaran LSD dan PMK dari wilayah perbatasan,” tegas Djoko pada Kamis (15/6/2023).

Untuk diketahui, terdapat 70 personel yang terlibat dalam pengawasan hewan ternak menjelang Idul Adha di Kabupaten Paser. Personel tersebut berasal dari Puskesmas di setiap kecamatan dan pegawai Disbunak.

“Dalam pengawasannya, kami juga akan melibatkan pihak kepolisian,” tambahnya.

Berdasarkan pengawasan terha-

dap hewan ternak yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terungkap bahwa masih ditemukan pemotongan hewan yang tidak memperhatikan aspek sanitasi dan kebersihan hewan.

Djoko menilai bahwa kesejahteraan hewan ternak seharusnya menjadi perhatian utama, mengingat daging yang dipotong akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain pengawasan terhadap penyakit, penting juga untuk memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan hewan ternak.

“Petugas perlu melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta penjual hewan ternak agar hewan yang dijual sudah mencapai usia yang cukup,” tutup Djoko. (bs)



Gubernur Kaltim, Isran Noor, bersama Direktur Eksternal, Legal & Security Kideco, Arif Kayanto (tengah).

Kideco Sabet Kategori Emas PROPER Kaltim 2023

PASER - PT Kideco Jaya Agung (Kideco) meraih kategori Emas, dalam penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau PROPER Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Kota Samarinda, Rabu (15/7/2023).

Penganugerahan ini diberikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor kepada Direktur Eksternal, Legal & Security Kideco, Arif Kayanto, bersamaan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023.

Gelaran penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap dedikasi dan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik lingkungan yang bertanggung jawab dalam memajukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup melalui berbagai upaya berkelanjutan.

Direktur Utama Kideco, M. Kurnia Ariawan menyampaikan, bahwa anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk ini, telah melakukan berbagai inisiatif sebagai turunan dari strategi ESG (Environmental, Sosial & Governance) perusahaan.

"Inisiatif kami terapkan di beber-

apa bidang sebagai upaya dalam pengendalian lingkungan," kata Kurnia.

Inisiatif itu diantaranya pembuatan kawasan hijau terpadu Samurangau Eco Park dengan aspek pendidikan dan budaya di dalamnya, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), reklamasi, Arboretum Tandarayan, penggunaan solar panel untuk perumahan karyawan.

Selain itu, penggunaan bus listrik untuk operasional angkutan karyawan, penanaman mangrove, serta sejumlah inisiatif lainnya bersama dengan mitra kerja melalui efisiensi bahan bakar dan penggunaan air.

"Ini juga ditunjang melalui inovasi digitalisasi, demi mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional bisnis," tambahnya.

Untuk diketahui, Kideco turut berkomitmen dalam kelestarian lingkungan yang diwujudkan dengan pemenuhan beberapa aspek. Diantaranya administrasi dan manajemen pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3 - limbah B3 dan limbah padat non B3.

Selain itu, reklamasi serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tambahan dan produksi bersih, konservasi, mitigasi perubahan iklim dan efisiensi energi, serta sertifikasi pengelolaan lingkungan hidup.

"Kami juga melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) secara kesinambungan di 72 lokasi binaan di Kabupaten Paser sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan," katanya.

Sekadar informasi, penghargaan PROPER merupakan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terhadap perusahaan yang telah mendukung kelestarian lingkungan hidup. Sementara kategori Emas merupakan apresiasi tertinggi atas kinerja perusahaan.

Untuk Kideco sendiri, penganugerahan ini sudah diterima sebanyak 9 kali. Prestasi ini tentunya merupakan hasil yang membanggakan sebagai wujud komitmen dan kerja sama manajemen, seluruh karyawan, serta dukungan dari para stakeholders, masyarakat dan pemerintah. (bs)



DEDDY/RADARMEDIA

Pertemuan Anggota Komisi I DPRD PPU.

Bijak Ilhamdani Dukung Penuh Kegiatan SMI PPU

PPU - Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dukung penuh acara kepemudaan yang diinisiasi Supermoto Indonesia (SMI) PPU Juli mendatang kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan Anniversary ke IV SMI PPU.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyampaikan pada saat pertemuan berlangsung di gedung DPRD PPU mendukung penuh acara tersebut, yang dimana acara tersebut bukan hanya menjadi perayaan anniversary ke IV SMI PPU saja akan tetapi terselip pula kegiatan sosial dengan membagikan tempat sampah ke pantaianjung. Secara tidak langsung kegiatan tersebut menjadi ajang promosi wisata PPU.

“Saya pribadi mendukung penuh acara yang akan dilaksanakan juli mendatang, bukan hanya acara pribadi yang mereka bawa tetapi bentuk sosial mereka juga akan bawa,” ujarnya bijak usai pertemuan, Kamis (15/6/2023)

Bukan hanya menjadi ajang anniversary semata yang dilakukan, akan tetapi ini akan menjadi suatu ajang promosi kabupaten dimana SMI PPU akan mengundang para rider supermoto di seluruh Kalimantan dengan jumlah yang fantastis.

“Ini akan menjadi ajang promosi kabupaten, yang dimana luar dari Kalimantan timur akan berdatangan di PPU juli mendatang pada kesempatannya pun nantinya kami akan mengawal rencana riding mer-

eka ke titik nol IKN,” ungkapnya

Harapannya pada acara berlangsung nanti dalam kondisi nyaman dan aman, serta apa yang menjadi rencana kedepan tentang kegiatan sosial serta promosi kabupaten berjalan dengan lancar.

“Dengan jumlah rider yang akan berdatangan juli mendatang di PPU dengan jumlah kurang lebih 500 rider seluruh Kalimantan kegiatan yang akan berlangsung nantinya bisa berjalan lancar, nyaman dan aman serta dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat PPU khususnya dalam bentuk pemanfaatan UMKM,” pungkasnya. (NRD)



Pelaksanaan Rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Samarinda.

Kesulitan Dapat Siswa Baru, MKKS SMP Swasta Minta Sekolah Negeri Tahan Diri Dalam Pendaftaran

SAMARINDA - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Samarinda mengadakan rapat untuk membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, pada Kamis (15/6/2023).

Ketua MKKS SMP Swasta Samarinda, Amiruddin, menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas kesiapan SMP swasta di Samarinda dalam PPDB tahun ajaran 2023/2024.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah bagaimana setiap SMP swasta di Kota Tepian dapat memenuhi kuota rombongan belajar (rombel), yang selalu menjadi masalah setiap tahun ajaran baru sejak diberlakukannya sistem zonasi.

"Oleh karena itu, kami berharap Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah negeri, setelah ditutup dan diumumkan, tidak membuka pendaftaran tahap kedua. Karena itu akan menjadi kesulitan bagi swasta. Jujur saja, sejak diberlakukannya sistem zonasi, kami kesulitan mencari siswa," tegasnya kepa-

da Media Kaltim, pada hari Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, jika Dinas Pendidikan dan Sekolah Negeri berkomitmen untuk mengikuti petunjuk teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta tidak membuka pendaftaran berulang kali setelah kuota rombongan belajar terpenuhi, maka akan terjadi pemerataan peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.

"Selama ini, kami (SMP swasta) merasa khawatir saat PPDB dimulai sejak diterapkan sistem zonasi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ada sekolah yang hanya memiliki 5 siswa baru, ada yang 12. Kami semua berperan dalam mendidik anak-anak bangsa, kami sadar akan adanya perbedaan tetapi kami adalah mitra dalam kesuksesan pendidikan anak-anak bangsa," ucapnya.

Amiruddin juga meminta kepada orang tua calon peserta didik agar tidak terpengaruh oleh stigma bahwa SMP Swasta itu mahal. Ia menjelaskan bahwa di Samarinda terdapat 48 SMP Swasta

yang memiliki keunggulan berbasis karakter, keagamaan, kedaerahan, dan nasional dengan biaya yang relatif terjangkau.

"Memang ada beberapa SMP swasta yang biayanya mahal, namun itu adalah sekolah terpadu. Terdapat banyak pilihan SMP swasta yang berkualitas dan terjangkau. Dan jangan ragu tentang kurangnya disiplin di sekolah swasta," jelas Kepala Sekolah SMP Aminah Syukur Samarinda tersebut.

Lebih lanjut ia menerangkan, bahwa untuk SMP swasta di Samarinda, pendaftaran PPDB telah dimulai bahkan sejak April lalu. Untuk batas akhir pendaftaran peserta didik baru sendiri akan ditutup hingga rombel terpenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Hak orang tua untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya, apakah swasta atau negeri. Yang jelas kami ingin menghapus stigma bahwa sekolah swasta itu mahal, itu salah. Karena sudah ada dana Bosda, dan Bosnas," pungkasnya. (eky)



Korban saat hendak di bawa mobil ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) menuju RSUD AW Syahraniie.

Tragis! Pria Ditemukan Tewas Terbujur Kaku di Kamar Guest House Samarinda

SAMARINDA - Tak ada yang mengira bahwa seorang pria berinisial HN (39), warga Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Utara, akan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan atau guest house yang terletak di Jalan KH Samanhudi, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.

Pria berusia 39 tahun tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan penginapan dalam keadaan terbujur kaku di tempat tidur di dalam kamar bernomor 217 pada Kamis (15/6/2023) sekitar pukul 14.30 WITA.

Salah seorang saksi yang merupakan pekerja penginapan, Halifiah (32), mengatakan bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WITA, ia mendatangi kamar korban untuk memberitahu tentang waktu check-out atau keluar dari kamar.

"Saya mengetuk pintu berkali-kali dan memanggil, tetapi tidak ada jawaban," ucap Halifiah saat diwawancara oleh awak media di lokasi kejadian.

Karena tidak ada respon dari dalam kamar, Halifiah memanggil

rekan kerjanya untuk memeriksa keadaan pria tersebut di dalam kamar. Ketika hendak membuka kunci pintu kamar, petugas penginapan terkejut saat mengetahui bahwa pintu kamar bernomor 217 tidak terkunci.

"Kami akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, kami melihat bahwa posisi tubuhnya sudah terbujur kaku. Saya memberitahu teman saya bahwa sepertinya dia sudah meninggal," ungkapnya.

Petugas penginapan kemudian memeriksa napas korban untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda pernafasan. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa pria tersebut telah meninggal dunia.

"Tubuhnya sudah kaku dan mulai memerah. Setelah mengetahui itu, kami segera menghubungi pihak kepolisian," jelasnya.

Lebih lanjut, Halifiah mengaku terakhir kali bertemu dengan pria tersebut pada pukul 01.00 WITA dini hari. Pada saat itu, mereka sempat berbincang, karena korban ingin

memperpanjang masa sewa kamar.

"Kami bertemu, dia (HN) ingin memperpanjang sewa kamar. Saya bilang agar dia datang keesokan harinya, tetapi dia memaksa. Dia mengatakan bahwa dia harus pergi keesokan harinya. Jadi dia membayar terlebih dahulu," sebut Halifiah. "Dia telah menginap di sini selama dua hari dan sendirian," tambahnya.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Unit Identifikasi Forensik (Inafis) Polresta Samarinda langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi jasad korban yang berada di lantai 3.

Setelah melakukan evakuasi pada pria tersebut, Unit Inafis Polresta Samarinda juga mengamankan barang bukti dan mengepung kamar tempat korban ditemukan. Kemudian, jasad korban dibawa ke RSUD AW Syahraniie untuk dilakukan visum.

Penyebab pasti kematian HN di kamar guest house tersebut belum dapat dipastikan saat ini, karena masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. (vic)



Hosted by:



INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.J.P.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Subject to confirmation



Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Fookh, S.H., M.Hum.
Nasib Mahkamah Konstitusi



Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana
Senior Pastor of BBI ROCK Ministry



Mark Mudri
Church Believer SA ACT Bible Society Australia
Chair Global Council of Advisors International



Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.
Advokat



Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb., FCI Arb.
MANAGING PARTNER SUNDAS INTERNATIONAL LAWYERS
DIRECTOR LAWFIRM LEGAL JUSTICE CENTER



Dr. Albert Arias, SH., MH
FACULTY PII UNIVERSITAS TRIKORA

OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

THEME

Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tutailah biarlah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE
- 01 JULY
2023**



**MENORAH HALL
LEMBAH PUJIAN**
JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:
<http://tiny.cc/indojc2023>

Information:
Michelle - 082217014339
Junus BM - 0821 1021 1110